



**UNIVERSITAS ANDALAS**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA  
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

**MARSHANDA KASAVINA PUTRI**

**1910512018**

**KEDJAJAAN**

**UNTUK**

**BANGSA**

**Dosen Pembimbing : Lukman, SE, M.Si**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**DEPARTEMEN EKONOMI**

**PADANG**

**2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA  
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh

Marshanda Kasavina Putri

1910512018

Diajukan ke Departemen Ekonomi  
Untuk memenuhi sebahagian syarat dalam mencapai derajat  
Sarjana Ekonomi

di

UNIVERSITAS ANDALAS

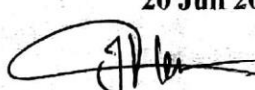
Juli 2023

© UNIVERSITAS ANDALAS. Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis.....

  
Departemen Ekonomi  
20 Juli 2023


Mengesahkan.....

  
Lukman, SE, M.Si  
Pembimbing Skripsi

Menerima.....

  
Yessy Andriani, SE, M.IDEC  
Kepala Program Studi S1 Ekonomi

Menyetujui.....

  
Dr. Fajri Muharja, SE, M.Si  
Ketua Departemen Ekonomi

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA  
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh

Marshanda Kasavina Putri

1910512018

Diajukan ke Departemen Ekonomi,

Pada tanggal 20 Juli 2023, untuk memenuhi sebahagian  
syarat dalam mencapai derajat  
Sarjana Ekonomi

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan jenis data *time series*. Alat analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier data panel. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu Belanja Modal dan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki lebih banyak peran dalam meningkatkan Belanja Modal dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang masih rendah, yaitu sebesar 39%.

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Rasio Kemandirian

Pembimbing Skripsi: Lukman, SE, MSi

## PERNYATAAN ANTI-PLAGIARISME

Saya menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat" merupakan hasil karya sendiri dan tidak terdapat sebagian maupun keseluruhan hasil karya orang lain yang saya kutip tanpa memberikan penghargaan yang semestinya kepada penulis aslinya. Bahagian yang bersumber dari karya orang lain telah saya cantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Jika di kemudian hari ditemukan unsur plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 20 Juli 2023



Marshanda Kasavina Putri  
1910512018

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

Dalam penyelesaian proposal skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, nasehat dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH** selaku Rektor Universitas Andalas.
2. **Bapak Efa Yonnedi SE, Ak , MPPM , Ph.D, Bapak Endrizal Ridwan, SE, MEC, Ph.D, Bapak Dr. Fery Andrianus, SE, M.Si, Bapak Ma'ruf SE, M.Bus, M.Phil, DB** selaku Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
3. **Bapak Dr. Fajri Muharja, SE, M.Si** selaku Ketua Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
4. **Ibu Yessy Andriani, SE, M.IDEC** selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Reguler, Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas.
5. **Bapak Lukman, SE, M.Si** selaku pembimbing yang telah memberikan ilmunya berupa petunjuk, bantuan. dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Ibu Dr. Yulia Anas, SE,M.Si** selaku penguji I dan **Ibu Dr. Neng Kamarni, SE,M.Si** selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
7. **Prof.Dr Firwan Tan, SE., M.Ec., DEA.Ing** selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberi dukungan dan nasihat kepada peneliti

selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Departemen Ekonomi beserta stafnya yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu yang sangat berguna.
9. **Kak Rina dan Kak Yel** selaku staff Biro Departemen Ekonomi yang telah banyak membantu dalam urusan akademik selama di perkuliahan dan persiapan seminar hasil skripsi penulis.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang selama ini menjadi inspirasi dan menjadi sangat berarti dalam kehidupan penulis::

1. Kedua orang tua (**Firman Efendi dan Wilda Marina**), serta adik saya (**Fazilla Zaima Putri dan Abdul Muhaimin Tanjung**), dan seluruh keluarga besar yang saya sayangi, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Sahabat dan teman-teman yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berdiskusi, serta memberi masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
3. Semua pihak yang telah ikhlas membantu dan namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Namun penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, dan semua pihak.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Padang, 20 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

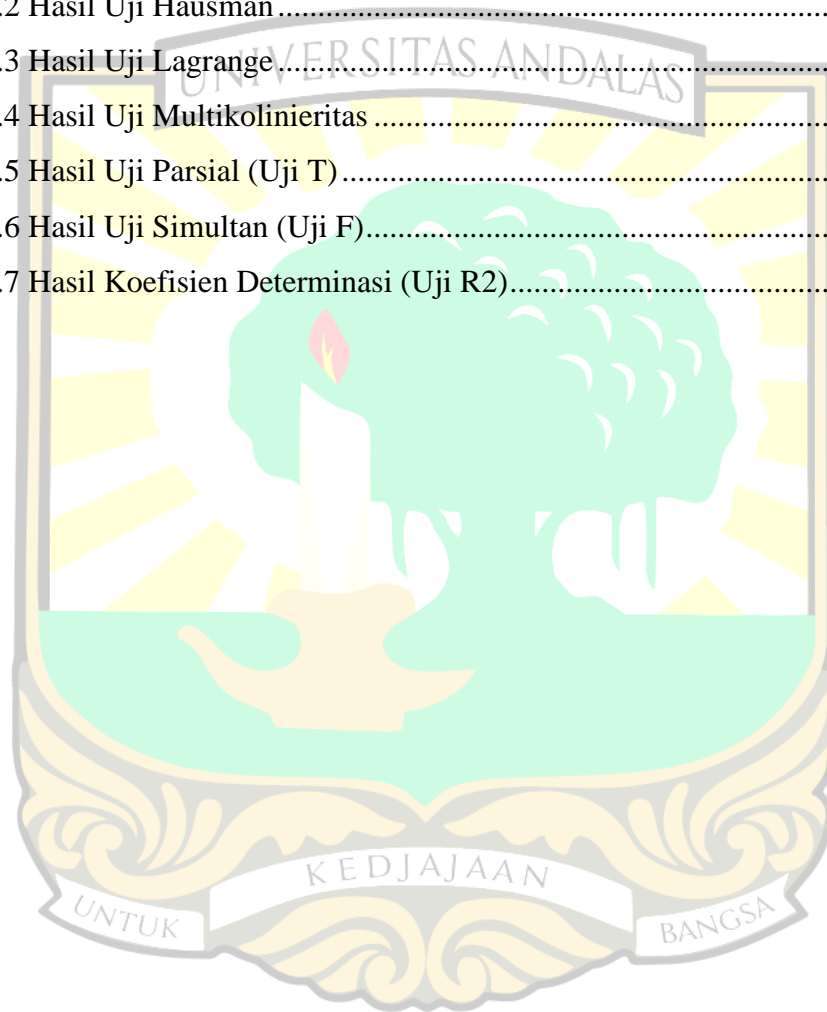
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI-PLAGIARISME</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Belanja Modal .....	7
2.1.1 Pengertian Belanja Modal.....	7
2.1.2 Pengelompokkan Belanja Modal.....	7
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	8
2.3 Pendapatan Asli Daerah .....	9
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
2.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
2.3.3 Fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	10
2.3.4 Kaitan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal .....	10
2.4 Dana Alokasi Umum (DAU).....	11
2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU).....	11
2.4.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).....	11
2.4.3 Kaitan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal .....	12
2.5 Penelitian Terdahulu.....	12
2.6 Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya.....	13
2.7 Kerangka Analisis .....	14
2.8 Hipotesis Sementara .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>16</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	16

3.1.1 Jenis Data.....	16
3.1.2 Sumber Data .....	16
3.2 Variabel Penelitian .....	16
3.2.1 Variabel Dependen (Y).....	16
3.2.2 Variabel Independen (X) .....	16
3.3 Metode Analisis Data .....	17
3.3.1 Metode Estimasi Analisis Model.....	17
3.3.2 Uji Pemilihan Model.....	18
3.3.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	19
3.3.4 Pengujian Hipotesis .....	19
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>21</b>
4.1 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Barat .....	21
4.2 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat .....	22
4.3 Perkembangan PAD dan Kaitannya dengan Belanja Modal pada Provinsi Sumatera Barat .....	23
4.4 Perkembangan DAU dan Kaitannya dengan Belanja Modal pada Provinsi Sumatera Barat .....	25
4.5 Rasio Kemandirian Provinsi Sumatera Barat.....	26
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
5.1 Hasil Analisis .....	28
5.1.1 Regresi Data Panel.....	28
5.1.2 Uji Asumsi Klasik.....	29
5.1.3 Pengujian Hipotesis .....	31
5.2 Pembahasan .....	34
5.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal ...	34
5.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal .....	35
5.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal .....	36
<b>BAB VI KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN.....</b>	<b>38</b>
6.1 Kesimpulan.....	38
6.2 Implikasi .....	38
6.3 Saran.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>x</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi APBD terhadap Belanja Modal .....	2
Tabel 4.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah .....	26
Tabel 4.2 PAD, APBD dan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .....	27
Tabel 5.1 Hasil Uji Chow .....	28
Tabel 5.2 Hasil Uji Hausman .....	28
Tabel 5.3 Hasil Uji Lagrange .....	29
Tabel 5.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	30
Tabel 5.5 Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	31
Tabel 5.6 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	33
Tabel 5.7 Hasil Koefisien Determinasi (Uji R <sup>2</sup> ) .....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	9
Gambar 4.1 Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2013-2022 .....	22
Gambar 4.2 PAD dan Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2013-2022 .....	24
Gambar 4.3 DAU dan Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2013-2022 .....	25
Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas.....	30
Gambar 5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	31



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Belanja modal pemerintah merupakan sebuah pembiayaan yang dialokasikan dalam membeli atau mengembangkan aset tetap atau aset tidak berwujud yang digunakan dalam operasi pemerintah dan merupakan program belanja daerah yang difungsikan untuk mendukung kegiatan masyarakat dan menaikkan tingkat kehidupan. Upaya perwujudan belanja modal berupa pengembangan pelayanan dasar, penyediaan sarana Kesehatan, Pendidikan, dan sarana umum yang memadai serta pengembangan jaminan sosial. (UU no.32 tahun 2004).

Pendanaan sektor modal pemerintah meliputi: Pembangunan infrastruktur; seperti jalan, jembatan, bandara, dan stasiun transportasi, Pembangunan fasilitas publik; seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan gedung pemerintah, Pembelian peralatan dan kendaraan, Investasi dalam proyek penelitian dan pengembangan yang membantu pemerintah meningkatkan kualitas layanan public, Pembelian saham dan aset intelektual seperti paten, merek dagang, atau hak cipta, serta pembelian aset tidak berwujud seperti hak atas tanah, izin operasi, atau lisensi.

Dalam meningkatkan fasilitas penunjang dan pelayanan, belanja modal adalah hal yang sangat berarti bagi pembangunan daerah, begitu juga di Sumatera Barat. Sharma (2012) berpendapat bahwa dalam proses pembangunan suatu daerah, ukuran, kapasitas belanja, dan efektifnya penggunaan pendanaan modal pemerintah mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena belanja modal adalah hal yang penting dalam pembangunan mengakibatkan pemerintah untuk menetapkan peraturan mengenai belanja modal minimum yang harus dialokasikan dalam APBD. Dengan adanya regulasi mengenai minimal belanja dari berbagai aspek APBD, Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang terdapat

pada daerahnya sendiri, hal tersebut berdampak positif dalam mengurangi bergantungnya daerah pada pemerintah pusat (Sharma 2012).

Dalam pengalokasiannya Pemda berwenang paling sedikit 30% untuk belanja modal dari dana APBD. Hal itu diterangkan pada Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Kembali menata Belanja Birokrasi pada Pemerintah Daerah dengan membuat UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang didalamnya disebutkan hal terkait penetapan ambang batas maksimal yang dipergunakan untuk pembelanjaan pegawai dan ambang batas jumlah minimal dari pembelanjaan modal yang pemerintah daerah harus alokasikan. UU tersebut mengatur mengenai regulasi minimal belanja modal yaitu minimal 40% dari APBD.

Amanat tersebut masih dalam proses realisasi yang sempurna oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum maksimal dalam pemenuhan pendanaan alokasi Belanja Modal pada APBD setiap tahunnya yang telah disahkan.

Tabel 1.1 Alokasi APBD terhadap Belanja Modal  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Tahun	APBD (Ribu Rupiah)	Belanja Modal (Ribu Rupiah)	Alokasi APBD terhadap Belanja Modal (Persentase)
2016	4.624.674.545,94	989.929.771,43	21,4
2017	6.066.826.853,96	832.177.367,82	13,7
2018	6.431.896.764,30	1.099.701.408,41	17,1
2019	6.390.272.565,58	1.062.230.453,03	16,6
2020	6.987.605.742,78	724.582.416,05	10,4

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat dari tabel diatas pada tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat membelanjakan 21,4% Belanja modal dari akumulasi APBD dan terus cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2020 yaitu sebesar 10,4%. Hal tersebut dapat menggambarkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memanfaatkan dengan maksimal aliran dari pendapatan daerahnya dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui penganggaran Belanja Modal yang cukup (BPS Provinsi Sumatera Barat).

Tidak maksimalnya alokasi dari Belanja Modal, menyebabkan beberapa masalah yaitu, kurangnya perhatian terhadap fasilitas umum yang mana hal tersebut termasuk dalam komponen belanja modal yang seharusnya dislokasi lebih banyak, karena hal tersebut menunjang masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial ekonomi. Diperlihatkan bahwa anggaran untuk belanja pegawai dalam data pada BPS Provinsi Sumatera Barat bahwa pendanaan melalui gaji dan tunjangan Pegawai justru lebih tinggi, hingga menyentuh angka lebih dari 40% dari tahun 2016-2020. Apabila semakin rendahnya pembiayaan dalam belanja modal maka semakin sedikit peluang dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah. (BPS Provinsi Sumatera Barat)

Jika dilihat dari segi manfaat pada belanja daerah, bila dialokasikan untuk pembiayaan pada sektor modal, akan lebih produktif dan bermanfaat untuk menopang pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu infrastruktur dan fasilitas yang memadai akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonominya. Jika fasilitas sudah memadai, maka hal ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas dari masyarakat yang akan meningkat karena keamanan serta kenyamanan yang dirasakan pada aktivitas sehari-harinya (Kementerian Keuangan). Dengan adanya sarana yang mendukung, dapat menciptakan peluang dalam memikat minat para investor dalam berinvestasi di Sumatera Barat. Pelayanan publik diharapkan bisa menjadi semakin layak dan memadai apabila terjadi peningkatan anggaran belanja daerah, karena hal tersebut berdampak pada kenaikan modal investasi belanja Pemda, namun yang terjadi kini adalah anggaran belanja lainnya tidak ikut meningkat dengan meningkatnya PAD.

Salah satu strategi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membangun perekonomian daerah yang semakin kuat yaitu dengan melakukan pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut didukung oleh berbagai upaya desentralisasi, salah satunya adalah pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan utama dari desentralisasi tersebut tidak lain untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meminimalisir terjadinya ketimpangan pembangunan (Kementerian Keuangan).

Berdasarkan asas desentralisasi pembiayaan dalam menjalankan pemerintahan dilakukan atas beban APBD. Dalam APBD kondisi ekonomi pada suatu daerah memperlihatkan anggaran sektor publik pemerintahnya. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah akan lebih leluasa menyalurkan dana belanja modal untuk membangun daerahnya jika suatu daerah memiliki kemandirian yang tinggi. Hal ini dilihat dengan membandingkan antara PAD dengan akumulasi pendapatan. Untuk mengetahui kecenderungan pola belanja daerah dalam mengalokasikan dana belanja terkait upaya peningkatan, dapat dilihat melalui sisi pengeluaran (Larasati, 2015).

Belanja daerah sendiri adalah seluruh biaya daerah selama jangka tahunan anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Salah satu post yang terdapat pada belanja daerah yaitu, pos Belanja modal. Adapun faktor berikut diduga mempengaruhi besar kecilnya belanja modal di suatu daerah, seperti ; Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, luas wilayah, kondisi infrastruktur dan jumlah penduduknya.

Pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah dan mengelola potensi lokal akan membuat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan lebih efisien dan merata. Tumbuhnya perekonomian daerah yang besar akan berkaitan dengan peningkatan yang terjadi pada pendapatan asli daerahnya. Menurut Saragih (2003) dengan adanya peningkatan PAD memberikan peran bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Jika pertumbuhan ekonominya meningkat berarti daerah mempunyai kemungkinan memiliki peningkatan pada PAD. Dengan adanya peningkatan tersebut membuat suatu daerah memiliki keleluasaan lebih, dalam membelanjakan kebutuhan untuk belanja modalnya.

Selain itu, DAU juga membantu menopang keuangan daerah. Halim (2014) mengemukakan bahwa dana transfer jangka panjang yang berupa DAU memiliki pengaruh positif dengan belanja modal dan jika adanya penurunan dalam dana transfer dapat menimbulkan pengurangan bagi pengeluaran belanja modal.

Aditya Putra W. (2015) berpendapat adanya tren positif antara jumlah penduduk terhadap belanja modal. Jika jumlah penduduk pada suatu daerah semakin tinggi, maka hal tersebut mengakibatkan tingginya tingkat belanja modal pada daerah tersebut.

Tak hanya jumlah penduduk, luas wilayah suatu daerah juga mempengaruhi tingkat belanja modal pada daerah tersebut. Ardhini (2011) berpendapat bahwa semakin besar wilayah suatu daerah, hal tersebut akan berpengaruh pada luas perhatian yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Salah satu cara dalam menaikkan kualitas masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kualitas infrastrukturnya. Jika luas wilayah semakin besar, maka dibutuhkan pula biaya pembangunan dan pemeliharaan yang lebih besar.

Kelayakan dan keberadaan infrastruktur menjadi suatu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya merupakan penghubung antar aktivitas ekonomi (Purwoto dan Kurniawan, 2009). Jika suatu daerah terdapat sarana infrastruktur yang rendah dan infrastruktur yang tidak terawat, maka dibutuhkan belanja modal yang lebih besar untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di daerah tersebut.

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi belanja modal, peneliti ingin mengkaji upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui anggaran daerah yang diterima yang difokuskan pada PAD dan DAU. Penelitian ini difungsikan untuk melihat seberapa besar pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan daerah dan menjadi referensi dalam menyusun strategi keuangan khususnya pada pos belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian sebelumnya atau terdahulu karena lokasinya berbeda. Berdasarkan penjelasan



yang telah penulis uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dilihat dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
2. Seberapa besar pengaruh DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
3. Seberapa Besar pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Melihat besarnya pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Melihat besarnya pengaruh DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Melihat besarnya pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Menjadi sumber pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai bagaimana PAD dan DAU dapat mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan maupun mempelajari yang bersangkutan dengan PAD, DAU dan Belanja



Modal Pemerintah.

- b. Menjadi bahan pertimbangan khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Belanja Modal**

##### **2.1.1 Pengertian Belanja Modal**

Belanja modal adalah pembelanjaan yang diprioritaskan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam rangka pemenuhan tugas daerah, di dalamnya disebutkan hal yang terkait dengan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum, serta pengembangan jaminan sosial (UU No. 32 tahun 2004).

Pengeluaran modal adalah pemberlakuan investasi pemerintah daerah dalam menghasilkan keuntungan lewat dari periode satu tahun, seperti penciptaan aset atau kekayaan daerah, dan dibedakan dari pengeluaran operasional, yang mencakup hal-hal seperti biaya pemeliharaan normal (Halim, 2014).

Dalam APBD, dana yang berupa belanja modal wajib pemerintah alokasikan dalam upaya penambahan aset tetap. Alokasi ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dan mengembangkan serta menambah fasilitas umum sesuai kebutuhan. Karena pada dasarnya belanja modal menjadi bentuk pelayanan publik yang berjangka panjang. Menurut Ghozali (2008), kategori belanja modal yaitu:

1. Untuk menambah aset, Pengeluaran pemerintah daerah mengarah pada pembelian aset.
2. Pembiayaan yang melewati batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan penetapan oleh Pemda.
3. Pembelian aset tetap tidak dimaksudkan akan diperjualkan kembali.

##### **2.1.2 Pengelompokkan Belanja Modal**

Ada beberapa pengelompokkan dalam pos pendanaan modal, yaitu :

1. Belanja Modal Tanah

Pembiayaan untuk pembelian/ pengadaan/ peninggalan pemukiman, pengalihan hak dan sewa, pengekangan, perataan, pengeluaran sertifikat dan pembiayaan lainnya.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pembiayaan dalam penggandaan, pemasangan, penggantian, perluasan mesin, dan peralatan, serta penimbunan persediaan yang diperlukan untuk digunakan selama periode interim 1 tahun sampai mesin dan peralatan dapat dikenakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menyediakan sumber daya melalui akuisisi, penggantian, dan pembangunan infrastruktur kapasitas yang diperluas, seperti bangunan dan struktur.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pembiayaan untuk membuat, menambahkan, menggandakan, meningkatkan, dan pemeliharaan sarana.

5. Belanja Modal Tetap Lainnya

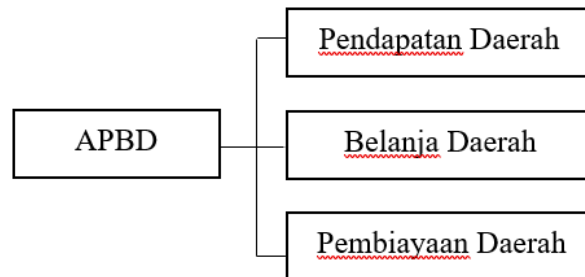
Pembiayaan untuk akuisisi, penambahan, penggantian, perbaikan pembangunan, manufaktur, dan pemeliharaan fisik lainnya, termasuk kedalam pengeluaran ini adalah kontrak sewa dan beli belanja modal untuk pembelian barang seni, barang antik dan museum.

## 2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim (2014) APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran maksimum dalam periode satu tahun untuk mendanai kegiatan serta program daerah .

APBD merupakan rencana keuangan dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Pada hakekatnya APBD merupakan alat kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. APBD mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

Gambar 2.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

## 2.3 Pendapatan Asli Daerah

### 2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jumlah uang diterima suatu daerah bersumber dari kegiatan yang dilakukan sepenuhnya di dalam wilayahnya sendiri dan dikenakan pajak sesuai dengan undang undang yang berlaku. Efisiensi daerah dalam pendanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah dan membangun daerah dapat diukur dengan melihat pos pendapatan daerah yang memiliki peran penting (Abdul Halim, 2014).

PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang didapatkan bersumber pada Peraturan Daerah yang disesuaikan melalui undang-undang. PAD sendiri adalah akumulasi dari penerimaan pajak, retribusi, penerimaan non pajak, dan pendapatan investasi serta pengelolaan SDA (UU No.23 Tahun 2014)

### 2.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipaparkan bahwa sumber-sumber PAD yaitu :

#### 1. Pajak Daerah

Urunan yang diterapkan oleh individu atau badan kepada Daerah yang disesuaikan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 yang bersifat mengikat serta memaksa, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan

dipergunakan dalam kebutuhan daerah dalam membangun kesejahteraan rakyat.

Pajak pada tingkat daerah memiliki tujuan ganda baik sebagai mekanisme pengaturan maupun sarana untuk mengumpulkan informasi tentang daerah tersebut.

## 2. Retribusi Daerah

UU Nomor 34 Tahun 2000 merupakan rangka pembaruan UU mengenai regulasi tentang Pajak. Dengan adanya UU pajak dan retribusi daerah yang baru, adanya sumber-sumber pendapat baru dapat memberikan keuntungan daerah. Namun ada beberapa sumber PAD yang harus dihapuskan karena daerah tidak diperbolehkan untuk memungutnya lagi, terutama berasal dari pos retribusi.

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan wilayah yang terpisah merupakan dasar dari pendapatan ini.

## 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PAD dapat digunakan untuk menganggarkan pendapatan daerah selain pajak serta hasil pengelolaan kekayaan daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Penerimaan aset pemerintah daerah dan aset lainnya yang dimiliki oleh daerah merupakan sumber langsung dari dana ini.

### **2.3.3 Fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menjadi Sebagian dari pilar anggaran daerah dana PAD dipergunakan untuk membiayai pembangunan daerah dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaannya, mengatur dampaknya, dan mendorong kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

### **2.3.4 Kaitan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal**

Jumlah PAD memiliki kesinambungan dengan jumlah belanja modal pemerintah. Jika lebih banyak jumlah PAD yang diterima berdampak pada semakin tingginya keleluasaan pemerintah membelanjakan untuk keperluan belanja daerah, yaitu belanja modal. Hal inilah yang kedepannya akan meningkatkan angka belanja modal pemerintah.

## **2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)**

### **2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU merupakan penerimaan dari APBN yang telah disalurkan kepada daerah sehingga kemampuan keuangannya kurang lebih sama untuk keperluan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan desentralisasi, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 33 Tahun 2004. Sebagai bagian dari proses desentralisasi, pemerintah pusat mengirimkan pendanaan kepada pemerintah daerah dari APBN untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses untuk sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya tumbuh dan berkembang, pendanaan ini berasal dari DAU.

Untuk membantu keuangan daerah, pemerintah pusat memiliki tujuan sebagai berikut, sebagaimana diklasifikasikan oleh Pratiwi (2007):

- a. Memicu terciptanya pemerataan antar wilayah
- b. Meluaskan akuntabilitas
- c. Menaikkan sistem pajak agar lebih progresif.
- d. Menaikkan keberterimaan pajak daerah

DAU merupakan bagian dari anggaran pendapatan serta belanja daerah yang pemerintah pusat kirimkan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. DAU ini merupakan salah satu pos keuangan daerah yang dialokasikan sebagai dana pembangunan. Pemerintah akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menutup kesenjangan dalam kemampuan keuangan daerah dan pelayanan publik jika menerima lebih banyak uang dalam DAU, yang dapat dikenakan dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur.

### **2.4.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Proporsi DAU yang diberikan kepada daerah berdasarkan kapasitas fiskal dan kebutuhannya, dan diurutkan dari yang kebutuhan fiskalnya paling besar hingga yang terkecil. Pendanaan DAU dimasukkan dalam bagian transfer pemerintah pusat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Celah fiskal suatu daerah ditentukan dengan menggunakan selisih anggaran. Hal itu dapat dilakukan dengan membandingkan defisit dengan total sumber daya fiskal daerah. Saat kita berbicara tentang kebutuhan daerah, kita mengacu pada kebutuhan keuangan daerah untuk penyediaan layanan publik yang esensial.

#### **2.4.3 Kaitan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal**

Sebagai pendanaan daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan adalah dana alokasi umum ini. Pemerintah akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menutup kesenjangan dalam kemampuan keuangan daerah dan pelayanan publik jika menerima lebih banyak pendanaan dalam DAU, yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

#### **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang diteliti oleh Iseu Anggarni, dkk (2022) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal, Pada Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2010-2019” . Metode kuantitatif melalui analisis regresi berganda. Analisis ini menemukan bahwa antara tahun 2010 hingga 2019, Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dipengaruhi 79 persen oleh PAD dan DAU

Penelitian oleh Akbarurriqillah A.A. dan Suwardi B.H. (2017) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal”. Metode regresi data panel yang diterapkan pada penelitian ini. Dapat diketahui bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal .

Penelitian yang dilakukan Feb dwi Suryana dan Eka Pariani (2018) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”. Regresi linier berganda digunakan untuk analisis di sini. Studi ini menemukan bahwa PAD dan DAU memiliki dampak gabungan sebesar 52,30 persen terhadap belanja modal di kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Silo Sumarsono (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap



Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Dari penelitian ini ditemukan jika secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

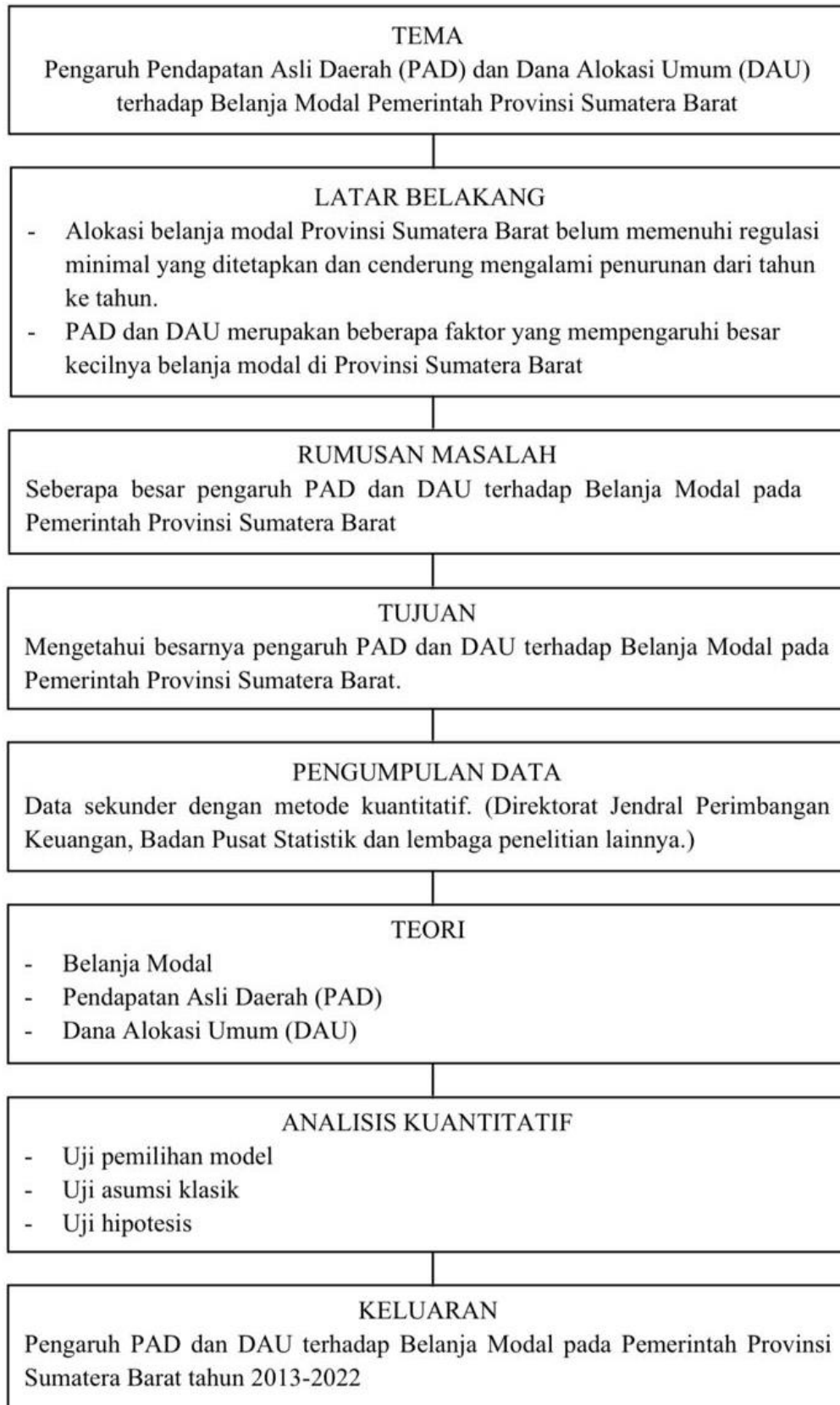
## **2.6 Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya**

Secara keseluruhan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang terdahulu adalah perbedaan lokasi penelitian. Selanjutnya perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Feb dwi Suryana dan Eka Pariani (2018) dan penelitian Iseu Anggarni, dkk (2022) adalah terdapat perbedaan pada metode penelitian, untuk metode yang penulis gunakan adalah metode regresi data panel. Sedangkan metode yang digunakan oleh Feb dwi Suryana dan Eka Pariani (2018) dan Iseu Anggarni, dkk (2022) adalah metode regresi linier berganda. Selain itu terdapat pula perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbarurruzqillah dan Suwardi (2017) dan penelitian Silo Sumarsono (2022) ialah adanya perbedaan jumlah pada variabel independennya, jika pada penelitian Silo Sumarso dan penelitian Akbarurruzqillah dan Suwardi terdapat pula Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel independen, sedangkan untuk variabel lainnya sudah sama.

Penulis tidak memasukkan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dikarenakan DAK hanya diberikan kepada daerah yang memiliki kegiatan khusus yang memiliki prioritas nasional tinggi dan memenuhi kriteria tertentu.



## 2.7 Kerangka Analisis



Sumber: Penulis

## 2.8 Hipotesis Sementara

Jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu dilakukan pengujian biasa disebut dengan hipotesis. Hipotesis awal adalah sebagai berikut berdasarkan kerangka teoritis dan temuan penelitian sebelumnya:

1. Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat korelasi positif antara PAD dan Belanja Modal Pemerintah. Semakin banyak PAD, semakin banyak Belanja Modal.
2. Ada korelasi positif antara DAU dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena jumlah DAU menunjukkan peningkatan Belanja Modal.
3. Terdapat korelasi positif antara PAD dan DAU dengan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Penelitian ini memakai data sekunder yang mencakup data mentah serta data yang telah diproses, baik pada bentuk angka maupun deskripsi.

##### **3.1.2 Sumber Data**

Untuk penelitian ini, diperlukan data mengenai PAD, DAU, serta belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data ini didapatkan dari sumber seperti Badan Pusat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Statistik (BPS), serta berbagai situs web, literatur, dan jurnal yang relevan untuk mendukung penulisan ini.

#### **3.2 Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel berikut:

##### **3.2.1 Variabel Dependen (Y)**

Variabel ini adalah variabel yang bergantung pada variabel independen. Jumlah belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013-2022 digunakan sebagai variabel pada penelitian ini. Rupiah merupakan mata uang di mana variabel ini ditampilkan.

##### **3.2.2 Variabel Independen (X)**

Variabel ini termasuk faktor yang berdampak pada perubahan variabel terikat. Pada penelitian ini variabel independennya yakni :

1. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Data yang diperoleh yakni jumlah PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013-2022. Besaran variabel ini diukur dalam mata uang rupiah.

2. Dana Alokasi Umum (X2)

Data yang diperoleh yakni DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013-2022. Besaran variabel ini diukur dalam mata uang rupiah.

### 3.3 Metode Analisis Data

Analisis ini menggunakan regresi data panel, yang menggabungkan *time series* dan *cross section*. Menurut Panchanan Das (2019) analisis kuantitatif ini menghasilkan persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Jumlah Belanja Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2022

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Jumlah PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2022

$X_2$  = Jumlah DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2022

e = standar error

#### 3.3.1 Metode Estimasi Analisis Model

Dengan menggunakan data panel terdapat tiga pendekatan yang dilakukan dalam metode estimasi model regresinya, yaitu :

##### A. Common Effect Model (CEM)

CEM (Common Effects Model) adalah cara termudah untuk memodelkan data panel, yang menggabungkan data *cross-sectional* dan *time-series*. CEM tidak berfokus pada dimensi waktu atau individu dan karena itu mengasumsikan bahwa perilaku perusahaan tetap konstan dari waktu ke waktu (Basuki, 2016).

##### B. Fixed Effect Model (FEM)

Pada model ini, mungkin terdapatnya perbedaan antara objek meskipun memiliki persamaan koefisien regresi. Menurut Winarno (2017), efek tetap mengacu pada ukuran tetap suatu objek dengan besaran yang

konsisten selama periode waktu yang berbeda, serta koefisien regresi yang tetap dari waktu ke waktu.

### **C. Random Effect Model (REM)**

Model memanfaatkan residual yang dianggap memiliki hubungan antara waktu dan subjek. Parameter yang berbeda antar wilayah dan waktu kemudian disertakan dalam kesalahan. Model ini disebut model efek acak atau model komponen error. (Winarno, 2017)

### **3.3.2 Uji Pemilihan Model**

Berikut merupakan Uji pemilihan model menggunakan data panel, yaitu :

#### **A. Uji Chow**

Uji ini termasuk uji yang dipakai dalam memilih apakah akan menggunakan model CEM atau FEM Chow Test. Jika pada pengujian nilai pada F hitungnya lebih besar dari F tabelnya, menyebabkan  $H_0$  ditolak, jadi dapat diketahui bahwa teknik regresi data panel dengan FEM lebih baik dari CEM.

#### **B. Uji Hausman**

Uji Hausman merupakan pengujian yang pada dasarnya sebagai pertimbangan saat memilih model terbaik antara model FEM atau REM. Estimasi yang benar untuk regresi data panel adalah FEM jika temuan uji Hausman lebih besar dari table besar dari tabel (nilai kritis statistik dari chi-square), maka  $H_0$  ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah FEM dan begitupun sebaliknya.

#### **C. Uji Lagrange Multiplier**

Lagrange Multiplier yakni pengujian dalam menentukan apakah model yang dipakai CEM atau REM. Ketika nilai probabilitas Breusch-Pagan lebih kecil nilai alpha maka  $H_0$  ditolak, dan model REM merupakan estimator yang tepat untuk regresi data panel, begitupun sebaliknya.

### 3.3.3 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji ini memiliki tujuan menghitung tentang bagaimana data tau variable tersebar dan melihat apakah cocok dengan distribusi normal. Tes ini menentukan apakah sampel mewakili distribusi populasi normatif.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah residual pengamatan dalam model regresi yang diberikan memiliki varians yang tidak sama. Dalam kasus homoskedastisitas, varian residu antara dua pengamatan adalah sama, tetapi dalam kasus heteroskedastisitas berbeda.

c. Uji Autokorelasi

Tes ini menguji stabilitas temporal dari hubungan antara variabel model prediksi. Jika model prediksi mengasumsikan autokorelasi, maka nilai gangguan selalu dipasangkan secara autokorelasi daripada secara independen.

d. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan potensi antar variabel independen dan dependen model. Meneliti nilai model regresi untuk melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Bila nilai koefisien korelasi setiap variabel bebas  $> 0,8$  akibatnya terjadi multikolinearitas. Tetapi bila koefisien setiap variabel bebas  $< 0,8$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.3.4 Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

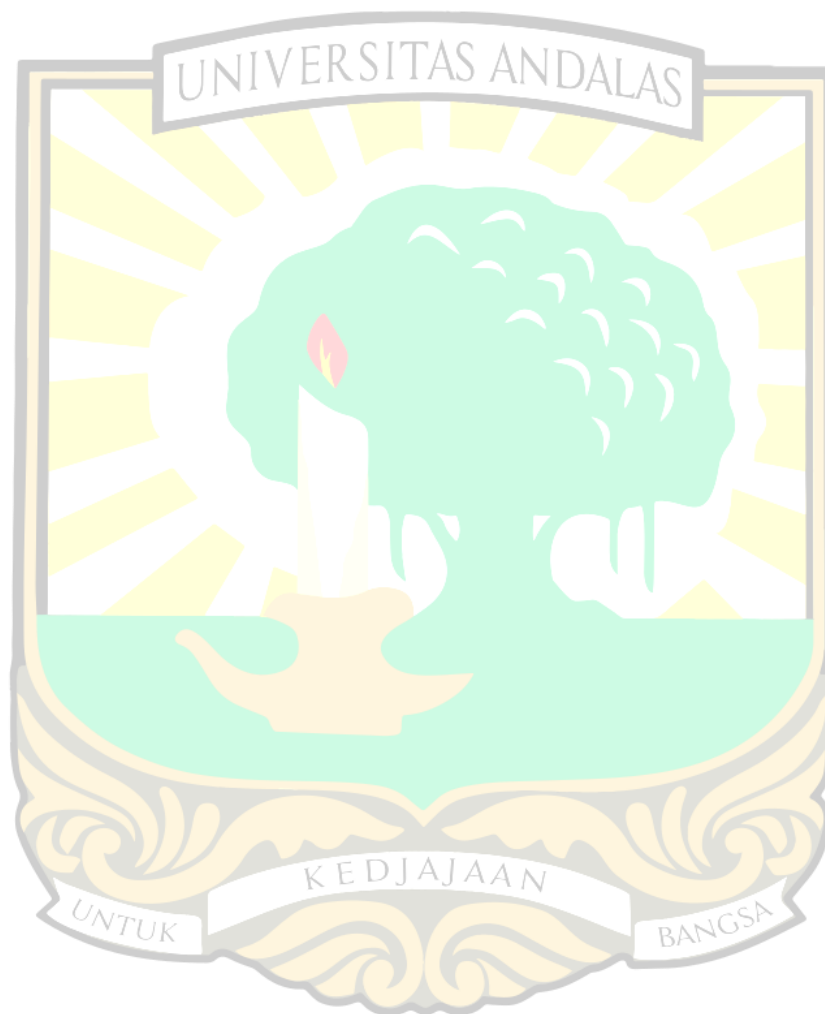
Dengan menggunakan kontribusi setiap variabel independen, maka dilakukan uji dengan menggunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi terlihat dari nilai R-square ( $R^2$ ) pada tabel Model Summary.

b. Koefisien F-statistik

Koefisien F-statistik digunakan untuk mengetahui variabel dependen dipengaruhi variabel independennya secara bersama-sama. Uji F dilakukan guna melihat pengaruh dari keseluruhan variabel bebas secara simultan pada variabel terikat.

c. Koefisien t-statistik

Uji ini dilakukan dengan menguji apakah koefisien regresi sama dengan nol, hal tersebut digunakan untuk menentukan hubungan signifikan dari variabel X dan Y. Jika hipotesis  $H_0$  ditolak, maka hipotesis alternatif diterima. Hal tersebut berarti terdapat hubungan antara variabel x dan y.)



## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat termasuk sebuah provinsi yang ada di Indonesia yang berlokasi di Pulau Sumatra dan memiliki ibukota yaitu Padang. Provinsi ini berbatasan dengan bagian utara dengan Provinsi Sumatera Utara, lalu bagian selatannya dengan Provinsi Bengkulu, bagian timurnya dengan Provinsi Riau dan Jambi, dan bagian baratnya dengan Samudera Hindia. Iklim tropis yang memiliki suhu udara yang cukup tinggi terdapat pada provinsi ini, antara 22,6 °C - 31,5 °C. Selain itu, garis khatulistiwa juga melewati provinsi ini Provinsi ini. Terdapat 29 gunung di provinsi ini yang membentang di tujuh kotamadya di Sumatera Barat. Provinsi ini terletak di wilayah Indonesia yang sering mengalami gempa bumi. Hal tersebut disebabkan letak Provinsi ini yang berada di jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua Eurasia dan India-Australia.

Provinsi ini memiliki luas wilayah 42.229.730 hektar, meliputi 12 Kabupaten dan 7 Kota, sebagai berikut:

<u>Kabupaten</u>	<u>Kota</u>
1. <u>Kabupaten Lima Puluh Kota</u>	1. Kota Padang
2. <u>Kabupaten Pasaman</u>	2. Kota Solok
3. <u>Kabupaten Solok Selatan</u>	3. Kota Sawahlunto
4. <u>Kabupaten Dhamasraya</u>	4. Kota Padang Panjang
5. <u>Kabupaten Pasaman Barat</u>	5. Kota Bukittinggi
6. <u>Kabupaten Kepulauan Mentawai</u>	6. Kota Payakumbuh
7. <u>Kabupaten Pesisir Selatan</u>	7. Kota Pariaman
8. <u>Kabupaten Solok</u>	
9. <u>Kabupaten Sijunjung</u>	
10. <u>Kabupaten Tanah Datar</u>	
11. <u>Kabupaten Padang Pariaman</u>	
12. <u>Kabupaten Agam</u>	



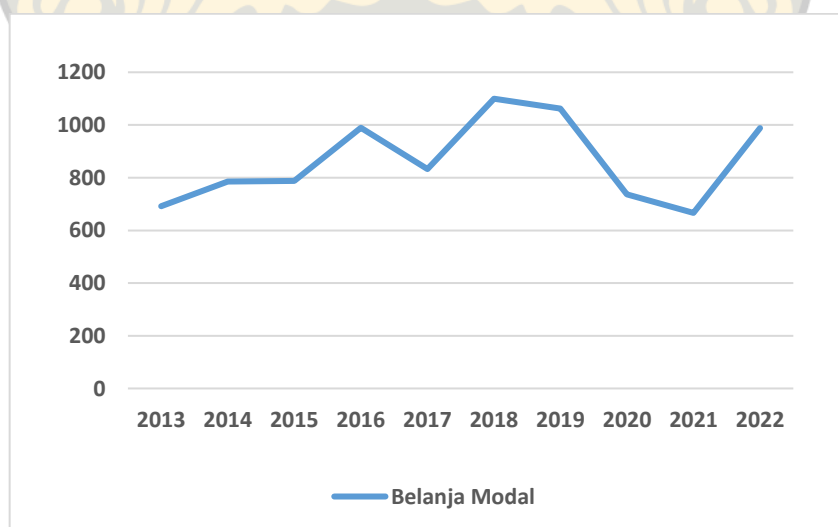
## 4.2 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat

Menurut Halim (2014) Pengeluaran modal adalah investasi yang pemerintah daerah lakukan untuk menghasilkan keuntungan lewat dari periode satu tahun, seperti penciptaan aset atau kekayaan daerah, dan dibedakan dari pengeluaran operasional, yang mencakup hal-hal seperti biaya pemeliharaan normal. Dalam proses pembangunan suatu daerah, ukuran, kapasitas belanja, dan efektifnya penggunaan pendanaan modal pemerintah mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena belanja modal adalah hal yang penting dalam pembangunan mengakibatkan pemerintah untuk menetapkan peraturan mengenai belanja modal minimum yang harus dialokasikan dalam APBD. (Sharma 2012).

Belanja modal merupakan pos pengeluaran yang sangat penting bagi pembangunan suatu daerah, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Belanja modal pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa pengadaan tanah dan berbagai alat penunjang, seperti ; alat angkut, berat, bengkel, perlengkapan kantor, pertanian, komputer, furniture, dapur, studio, komunikasi, dekorasi ruangan, ukur, kesehatan, laboratorium, penerangan jalan, jalan konstruksi, jaringan air bersih, jembatan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon (BPS Sumbar, 2020).

Berikut ini grafik perkembangan belanja modal Provinsi Sumatera Barat dari data Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013-2022.

Gambar 4.1 Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2013-2022



Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2023

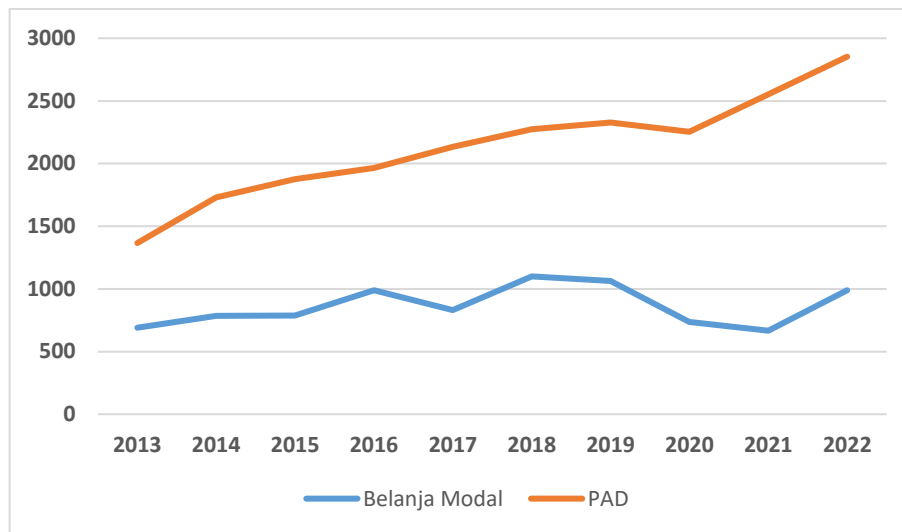
Dari Gambar 4.1 bisa diketahui bahwa belanja modal pemerintah Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Belanja modal terbesar terdapat di tahun 2018, sedangkan untuk belanja modal terendah terdapat di tahun 2021. Penurunan belanja modal yang cukup tajam pada tahun 2020 dan 2021 salah satunya disebabkan oleh Covid-19 yang menyerang Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Yang mana alokasi dana pada tahun tersebut lebih difokuskan pada sektor kesehatan. Kemudian pada tahun 2022 Belanja modal Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan.

#### **4.3 Perkembangan PAD dan Kaitannya dengan Belanja Modal pada Provinsi Sumatera Barat**

UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya PAD yaitu pemasukan yang didapatkan daerah bersumber pada Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sendiri adalah akumulasi dari penerimaan pajak, retribusi daerah, penerimaan non pajak, dan pendapatan investasi serta pengelolaan SDA. Menurut Resti (2019) PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi masing-masing daerah yang harus selalu meningkat dalam rangka pembiayaan belanja daerah, khususnya belanja modal. Nani and Vitor (2012) Pendapatan daerah dan belanja modal ditemukan saling berkesinambungan, artinya perubahan pendapatan daerah menyebabkan perubahan belanja modal. Menurut Venkataraman dan Urmi (2017), pendapatan daerah berupa PAD berdampak positif terhadap belanja modal daerah dalam pembangunan daerah pada jangka pendek maupun jangka panjang.

Berikut ini grafik perkembangan PAD dan belanja modal Provinsi Sumatera Barat dari data Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013-2022.

Gambar 4.2 PAD dan Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2013-2022



Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2023

Dari Gambar 4.2 dapat diketahui bahwasanya belanja modal pemerintah provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya, sedangkan PAD cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 PAD Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dan kemudian meningkat kembali pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan trend PAD dan belanja modal mengalami peningkatan, tetapi jika diurutkan dari waktu ke waktu belanja modal cenderung berfluktuasi sedangkan PAD cenderung mengalami peningkatan terus menerus. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa kenaikan PAD tidak menyebabkan sepenuhnya kenaikan pada belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Yang mana berarti pengalokasian PAD pada Provinsi Sumatera Barat lebih besar pada pos-pos belanja lainnya.

Dapat dilihat pada tahun 2020 PAD dan Belanja modal, keduanya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi akibat pandemic covid-19 yang menyebabkan banyak sektor ekonomi masyarakat yang terdampak hingga tidak bisa menghasilkan PAD. Kemudian pada tahun berikutnya PAD kembali meningkat, salah satunya melalui program pemulihan perekonomian dan

pengendalian pandemi Covid-19. Sedangkan untuk belanja modal tetap terjadi penurunan dikarenakan pemerintah dalam pengalokasian dana masih terfokus pada bidang kesehatan. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2022.

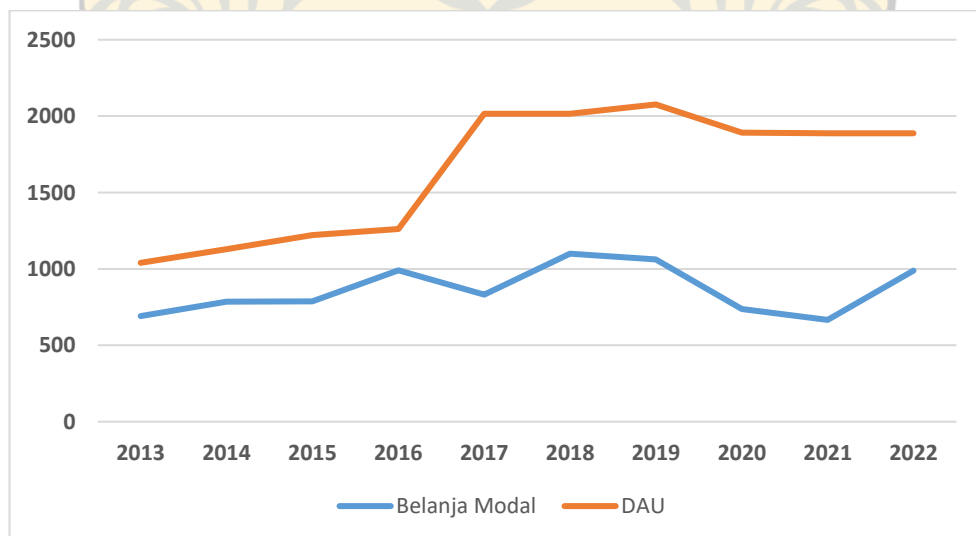
#### 4.4 Perkembangan DAU dan Kaitannya dengan Belanja Modal pada

##### Provinsi Sumatera Barat

Dinyatakan dalam UU No. 33 Tahun 2004 jika DAU adalah penerimaan yang berasal dari APBN kemudian telah disalurkan kepada daerah sehingga kemampuan keuangannya kurang lebih sama untuk keperluan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan desentralisasi. Uang transfer, termasuk bantuan DAU, memungkinkan daerah untuk berinvestasi dalam infrastruktur seefisien mungkin. Semakin besarnya DAU yang disalurkan oleh pusat, semakin banyak sumber daya yang tersedia untuk penanaman modal daerah, yang pada dasarnya memungkinkan penyediaan layanan, infrastruktur, dan fasilitas publik yang lebih baik. Otoritas local memiliki kewenangan penuh atas DAU dan mengarahkan penggunaannya untuk memenuhi prioritas lokal. (Made Ari dan Ni Putu 2018)

Berikut ini grafik perkembangan DAU dan belanja modal Provinsi Sumatera Barat dari data Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013-2022.

Gambar 4.3 DAU dan Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2013-2022



Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2023

Dari Gambar 4.3 di atas dapat diketahui bahwa DAU dan belanja modal pemerintah provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 DAU Provinsi Sumatera Barat menduduki posisi terendah dalam 10 tahun terakhir. Kemudian kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2017.

Secara keseluruhan trend DAU dan belanja modal tidak berjalan searah, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2017 DAU mengalami peningkatan yang cukup pesat sedangkan belanja modal justru mengalami penurunan, begitupun pada tahun 2022, DAU cenderung stagnan dengan tahun sebelumnya, tetapi belanja modal justru mengalami peningkatan yang cukup terlihat. Berdasarkan grafik diatas dapat diduga bahwa naik turunnya DAU tidak menyebabkan sepenuhnya kenaikan pada belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### 4.5 Rasio Kemandirian Provinsi Sumatera Barat

Tingkat kemandirian pemerintah provinsi didasarkan pada rasio PAD terhadap APBD untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan pemerintah provinsi. BPS merumuskan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Tabel 4.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

<u>Kemampuan Keuangan</u>	<u>Rasio Kemandirian</u>	<u>Pola Hubungan</u>
<u>Rendah Sekali</u>	0 – 25%	<u>Instruktif</u>
<u>Rendah</u>	> 25-50%	<u>Konsultatif</u>
<u>Sedang</u>	>50-75%	<u>Partisipatif</u>
<u>Tinggi</u>	>75-100%	<u>Delegatif</u>

Sumber : Halim, 2014

Tabel 4.2 PAD, APBD dan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

<u>Tahun</u>	<u>PAD</u> <u>(Miliar Rupiah)</u>	<u>APBD</u> <u>(Miliar Rupiah)</u>	<u>Rasio</u> <u>Kemandirian</u> <u>Keuangan Daerah</u>
2013	1.366,18	3.283,83	42%
2014	1.729,22	3.876,11	45%
2015	1.876,73	4.326,35	43%
2016	1.964,15	4.624,67	42%
2017	2.134,01	6.066,83	35%
2018	2.275,09	6.431,90	35%
2019	2.328,43	6.390,27	36%
2020	2.255,07	6.987,60	32%
2021	2.551,90	6.780,12	38%
2022	2.853,34	6.611,00	43%
<b>Rata-rata</b>			<b>39%</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan tabel diatas mengenai rasio kemandirian keuangan daerah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2022 adalah sebesar 39%. Angka rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah tersebut tentu menyebabkan adanya perbedaan antara pola hubungan keuangan Pemerintah Pusat dengan keuangan pemerintah daerah. Rendahnya rasio kemandirian keuangan di Provinsi Sumatera Barat menjadikan pola hubungan keuangan yang diterapkan antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi Sumatera Barat adalah konsultatif, sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh Halim (2014). Pola hubungan konsultatif menandakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

**BAB V**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Hasil Analisis**

**5.1.1 Regresi Data Panel**

**5.1.1.1 Metode Estimasi**

**1. Uji Chow**

Uji ini ditujukan dalam mengetahui manakah teknik yang paling tepat, CEM atau FEM untuk estimasi data. Dari kedua teknik atau pendekatan tersebut yakni teknik CEM atau FEM, maka diperoleh uji chow yang dipaparkan pada tabel berikut ini

Tabel 5.1 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	70.452619	18	0.0000

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2023

Dari tabel 5.1 diatas diketahui nilai signifikan pada kolom *cross-section chi-square* yakni 0.0000 lebih kecil dari 0,05, maka dalam pengujian ini yang terpilih adalah model FEM.

**2. Uji Hausman**

Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah Teknik FEM atau REM yang paling tepat untuk estimasi data. Dari kedua Teknik atau pendekatan di atas yakni Teknik fixed effect model dan random effect model, maka diperoleh uji hausman yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.154231	2	0.00461

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2023



Dari tabel 5.2 diatas diketahui bahwa nilai signifikan pada kolom *cross-section random* adalah  $0.0461 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak, maka dalam pengujian ini yang terpilih adalah model FEM.

### 3. Lagrange Model

Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah Teknik CEM atau REM yang paling tepat untuk estimasi data. Dari kedua Teknik atau pendekatan di atas yakni Teknik CEM dan REM, maka diperoleh uji Lagrange Model yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Hasil Uji Lagrange

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	34.75537	110.9685	145.7238
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)

Sumber: Data Sekunder Diolah Tahun 2023

Dari tabel 5.3 diatas diketahui bahwasanya nilai signifikan Breusch-Pagan pada kolom *cross-section* adalah  $0.0000 < 0,05$ . Kemudian karena nilai p-value  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak, maka dalam pengujian ini yang terpilih adalah model REM.

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan di atas terkait pemilihan model CEM, FEM, REM. Peneliti menggunakan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange, maka peneliti dapat menyimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect model (FEM).

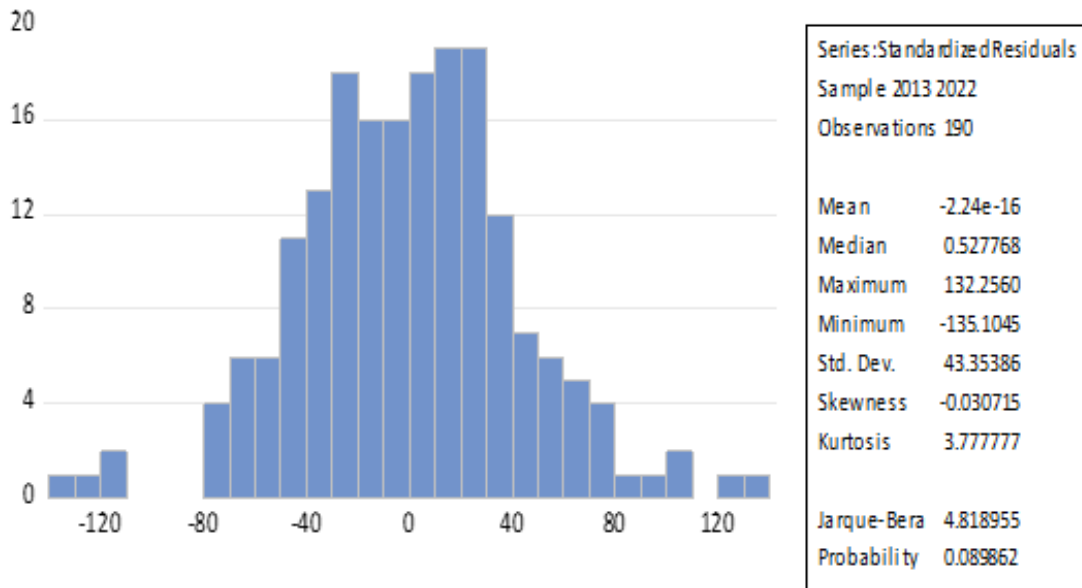
#### 5.1.2 Uji Asumsi Klasik

##### 5.1.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas juga dipakai oleh peneliti untuk mengkaji data yang telah diperoleh. Data penelitian dikatakan normal jika pada nilai signifikan berada di atas 5%. Hasil uji normalitas dipaparkan pada gambar dibawah ini



Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2023

Hasil uji normalitas pada gambar di atas menunjukkan bahwa uji probabilitas Jarque-Bera memiliki nilai signifikansi sebesar 0.089862. nilai  $0.089862 > 0,05$ , dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya residual berdistribusi dengan normal.

### 5.1.2.2 Uji Multikolinieritas

Dasar pengambilan keputusannya jika nilai korelasi antar variabel bebas  $> 0,8$  dapat dikatakan terdapat masalah multikolinieritas (Saraswati, 2017). Hasil uji multikolinieritas dipaparkan pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Hasil Uji Multikolinieritas

	PAD	DAU
PAD	1.000000	0.721962
DAU	0.721962	1.000000

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2023

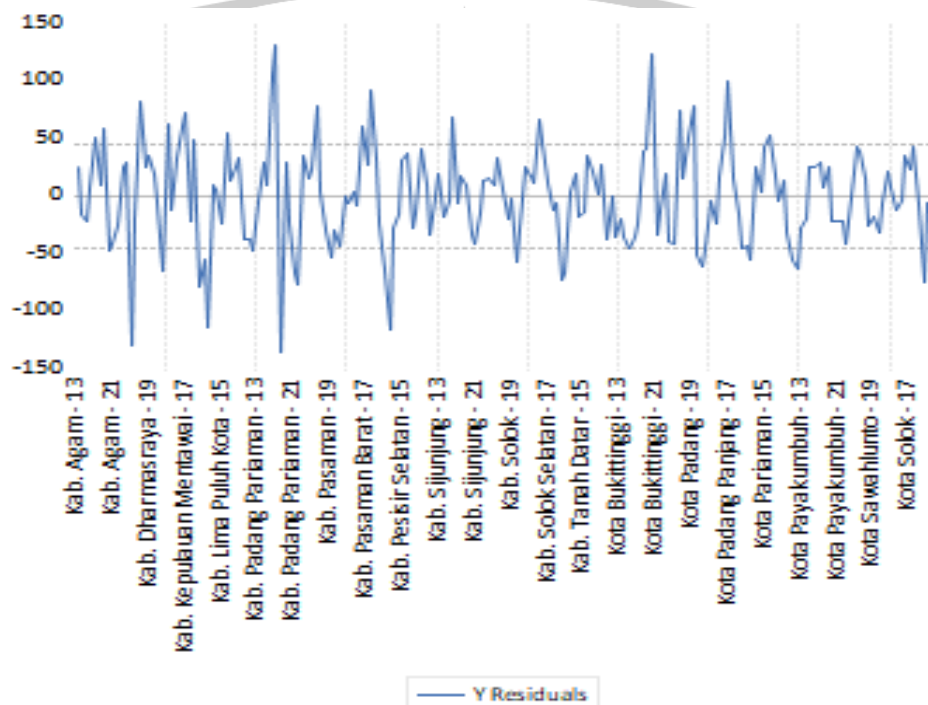
Berdasarkan pada tabel 5.4, terlihat bahwa hasil perhitungan menentukan nilai korelasi tiap-tiap variabel dependen PAD dan DAU memiliki nilai kurang

dari 0.8, yang berarti bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel bebasnya.

### 5.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yakni uji untuk melihat apakah model regresi memiliki varians yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas

Gambar 5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2023

Residual biru tetap berada dalam garis batas 500 dan -500 dalam grafik, yang menunjukkan bahwa varians residualnya sama. Oleh sebab itu lolos uji heteroskedasitas (Napitupulu, 2021).

### 5.1.3 Pengujian Hipotesis

#### 5.1.3.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial dilakukan dalam melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2013). H0 diterima apabila nilai signifikan  $<0,05$ .

Tabel 5.5 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.68645	42.12844	-1.749090	0.0821
PAD	0.240618	0.109216	2.203144	0.0289
DAU	0.393127	0.078272	5.022589	0.0000

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2023

Berdasarkan pada tabel 5.5 diatas didapatkan nilai signifikansi dari setiap variabel independen dalam penelitian ini. Adapun nilai signifikansi dari setiap variabel independen akan dibandingkan dengan tingkat kepercayaan adalah 0,05. Persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -73.7 + 0.24 * X_1 + 0.39 * X_2$$

Keterangan:

Y : Belanja Modal

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Dana Alokasi Khusus

1. Nilai konstanta sebesar -73,69 artinya tanpa variable PAD (x1) dan DAU (X2) maka variable Belanja Modal (Y) akan mengalami penurunan sebesar 73,68 miliar
2. Nilai Koefisien beta variable PAD (x1) sebesar 0,24, jika nilai variabel lain konstan dan variabel x1 mengalami peningkatan 1 miliar, maka variable Belanja Modal (y) akan naik 240,62 juta , begitupun sebaliknya.
3. Nilai Koefisien beta variable PAD (x1) sebesar 0,39, jika nilai variabel lain konstan dan variabel x2 mengalami peningkatan 1 miliar , maka variable Belanja Modal (y) akan naik 393,13 juta, begitupun sebaliknya

### 5.1.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan guna melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (Sugiyono,2019). Ha diterima apabila nilai signifikan  $<0,05$ .

Tabel 5.6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.676836
Adjusted R-squared	0.638592
S.E. of regression	45.84746
Sum squared resid	355236.2
Log likelihood	-985.2822
F-statistic	17.69771
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2023

Berdasarkan pada data yang sudah disajikan dalam tabel 5.6 maka bisa disimpulkan bahwa variabel PAD dan DAU berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dibuktikan dengan Nilai F hitung senilai  $17.69771 > F$  table yaitu,  $3,04424$  dan nilai pada Prob(F- statistic) yaitu  $0.000000$ , yang mana nilai tersebut  $< 0,05$ .

### 5.1.3.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan Koefisien Determinasi yang pada dasarnya berupaya untuk mengukur besaran kemampuan yang dimiliki oleh suatu variabel bebas yang termuat dalam masing-masing variabel terikat. Berikut adalah hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti,

Tabel 5.7 Hasil Koefisien Determinasi (Uji R2)

R-squared	0.676836
Adjusted R-squared	0.638592
S.E. of regression	45.84746
Sum squared resid	355236.2
Log likelihood	-985.2822
F-statistic	17.69771
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2023

Pada tabel 5.7 di atas menunjukkan nilai *R squared* 0.676836 menunjukkan nilai positif dan mendekati 1 yang artinya variabel bebas yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ini mampu mempengaruhi variabel terikat yaitu Belanja Modal.

Nilai Adjusted R square senilai 0.638592 atau 63,86%. Nilai Koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwasanya variabel independen yang terdiri dari PAD dan DAU mampu menjelaskan Variabel Belanja Modal sebesar 63,86%, sedangkan sisanya 36,18% (100 – nilai adjusted R square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## 5.2 Pembahasan

### 5.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk salah satu komponen penting dari penerimaan yang bersumber dari daerah yang diperoleh berdasarkan pada penghasilan pajak, retribusi, dan lain sebagainya (Nasir, 2019). Bagian yang termasuk ke dalam jenis PAD dalam penerapannya memiliki beberapa faktor lainnya yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut salah satunya adalah kewajiban yang dimiliki oleh daerah untuk mampu memenuhi kebutuhan dan juga biaya pembangunan terhadap daerah tersebut.

Berdasarkan dari hasil Uji Parsial (Uji T) sebelumnya diketahui bahwasanya variabel PAD atau yang digambarkan dengan X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Koefisien PAD 0,240618 dapat diinterpretasikan apabila PAD terjadi peningkatan sebesar 1 miliar, maka akan meningkat belanja modal sebesar 240,62 juta. Berpengaruhnya antara PAD terhadap belanja modal dijelaskan bahwa PAD merupakan satu pilar anggaran daerah. Dana PAD dipergunakan untuk membiayai pembangunan daerah dengan tujuan memperlancar pelaksanaannya, mengatur dampaknya, dan mendorong kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

Pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Jika pendapatan daerah tinggi, maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut dapat bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa wilayah sudah memiliki kemandirian sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbarurrizqillah dan Suwardi (2017) yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara PAD dan belanja modal. Ini berarti pengeluaran pemerintah untuk belanja modal akan meningkat dengan PAD.

### **5.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Menurut UU No.33 Tahun 2004 DAU merupakan penerimaan dari APBN yang telah disalurkan kepada daerah sehingga kemampuan keuangannya kurang lebih sama untuk keperluan pendanaan daerah dalam rangka mewujudkan desentralisasi. Tak hanya itu saja, kehadiran dari DAU juga bertujuan untuk memberikan kemandirian bagi pemerintah daerah untuk mengurus berbagai aspek dalam kedaerahan yang berlandaskan pada pelayanan terhadap masyarakat luas dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya kesenjangan secara fiskal di antara masing-masing daerah (Nurchaida, 2015)

Berlandaskan dari hasil Uji Parsial (Uji T) sebelumnya diketahui bahwa variabel DAU atau yang diprosikan dengan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Koefisien DAU 0.393127 dapat diinterpretasikan apabila DAU terjadi peningkatan DAU sebesar 1 miliar, maka akan meningkat belanja modal 393,13 juta. Berpengaruhnya antara DAU belanja

modal dijelaskan bahwasanya DAU yang bersumber dari APBN yang akan digunakan untuk mendistribusikan secara merata kemampuan fiskal daerah satu dengan daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan belanja. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat dan daerah berbagi uang. Transfer ini sangat penting untuk memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Untuk memberikan layanan publik yang penting, DAU dibuat untuk menyeimbangkan kekuatan fiskal kabupaten. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa jumlah DAU yang diterima pemerintah daerah berkorelasi positif dengan jumlah operasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Diharapkan bahwa dengan meningkatkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, penerimaan lokal akan meningkat. Penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai semua tanggung jawabnya untuk mengelola pemerintahan, termasuk peningkatan infrastruktur daerah.

Penelitian sebelumnya oleh Iseu Anggarni et al. (2022), Feb Dwi Suryana dan Eka Pariani (2018), Akbarurrizqillah dan Suwardi (2017), dan Silo Sumarsono (2022) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara DAU dan belanja modal. Ini berarti bahwa semakin tinggi DAU, semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk belanja modal.

### **5.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Dapat disimpulkan dari hasil Uji Simultan (Uji F) yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini bisa diartikan bahwasanya jika terdapat peningkatan maupun penurunan pada PAD dan DAU maka akan berdampak terhadap belanja modal. Hal tersebut diperkuat melalui nilai adjusted R square senilai 0.638592 atau 63,86%. Nilai Koefisien determinasi tersebut menunjukkan jika variabel independen yang terdiri dari PAD dan DAU mampu menjelaskan Variabel Belanja Modal sebesar 63,86%, sedangkan sisanya 36,18% (100 – nilai adjusted R square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.



Adanya hubungan antara PAD dan DAU terhadap belanja modal dapat diketahui bahwa semakin tingginya belanja modal disebabkan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. PAD merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Ketika PAD mengalami peningkatan salah satunya dari sektor pemungutan pajak maka PAD tersebut akan dialokasikan kepada belanja modal dan akan berdampak pada besar atau kecilnya dari anggaran belanja modal tersebut.

Kemudian tidak hanya PAD saja yang dapat mempengaruhi kegiatan belanja modal bantuan dana dari pemerintah juga mempunyai pengaruh yang besar dalam kegiatan belanja modal. Salah satu bantuan dari pemerintah pusat tersebut yakni DAU. DAU termasuk anggaran dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang didapatkan dari dana APBN. Dalam menunjang kegiatan belanja modal di pemerintah daerah DAU sangat berperan penting, karena jika hanya mengandalkan dari PAD saja akan terjadi kekurangan dana dari belanja modal. Jadi dengan adanya PAD dan DAU akan berdampak kepada besar atau kecilnya belanja modal bagi pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh penelitian Akbarurizqillah A.A. dan Suwardi B.H. (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Penelitian tersebut mengambil Objek penelitian yaitu adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berlandaskan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ini berarti bahwasanya semakin tinggi PAD, belanja modal juga akan meningkat, dan sebaliknya, jika terjadi penurunan pada PAD, belanja modal juga akan mengalami penurunan
2. Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ini berarti bahwasanya semakin tinggi DAU, belanja modal juga akan meningkat, dan sebaliknya, jika terjadi penurunan pada DAU, belanja modal juga akan mengalami penurunan
3. Secara simultan, PAD dan DAU memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. DAU Provinsi Sumatera Barat memiliki lebih banyak peran dalam meningkatkan Belanja Modal dibandingkan PAD. Hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang masih rendah, yaitu sebesar 39%.

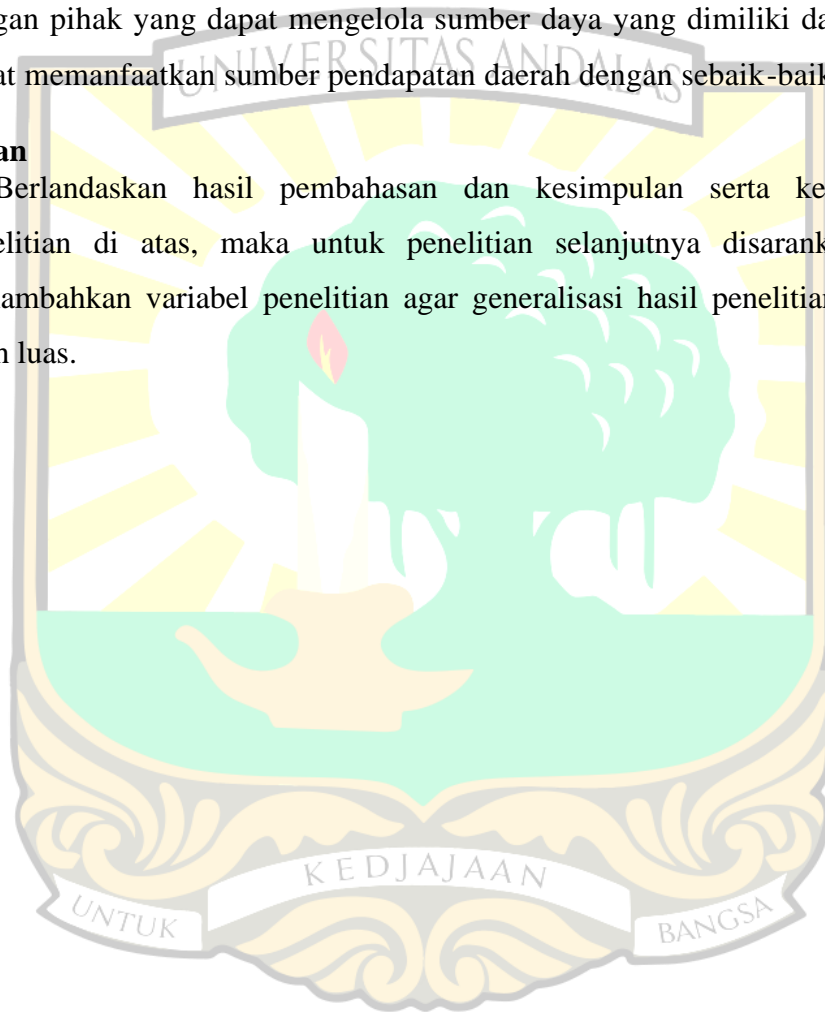
#### **6.2 Implikasi**

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa PAD dan DAU sangat penting bagi operasi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Anggaran Belanja Modal dikeluarkan dalam meningkatkan pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mendorong daerahnya untuk lebih menggali sumber penerimaan daerah yang berupa PAD, antara lain pendapatan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah, retribusi, dan pendapatan pengelolaan aset daerah agar terhindar dari ketergantungan pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas umum.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat lebih maksimal dalam pengalokasian belanja modal sehingga sesuai dengan regulasi minimal yang berlaku. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan belanja modal guna mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas keuangan daerah. Kegiatan tersebut dapat berupa pembentukan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi secara jelas dan tegas, dan memberi peluang bagi masyarakat setempat untuk bekerja sama dengan pihak yang dapat mengelola sumber daya yang dimiliki daerah agar dapat memanfaatkan sumber pendapatan daerah dengan sebaik-baiknya.

### 6.3 Saran

Berlandaskan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel penelitian agar generalisasi hasil penelitian menjadi lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Azhar, A., dan Hermanto, S. B. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
- Alpil, M. F., dan Sirait, R. F., 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*
- Amalia, Dyah. 2019. Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi Di Indonesia Tahun 2008 – 2017).
- Anggraini, I., Rachman, D., dan Karlimat, D. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2010-2019.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Asmawiah, S. H., Sulistiyo, H. 2022. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4150-4157.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota. <https://sirusa.web.bps.go.id/index.php/indikator/928>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Belanja. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/13/425/1/realisasi-belanja-pemerintah-provinsi-sumatera-barat-menurut-jenis-belanja.html>
- Basuki, Agus Tri. 2016. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. Jakarta: Rajawali Pers.
- Das, Panchanan. 2019. *Econometrics in Theory and Practice Analysis of Cross Section, Time Series and Panel Data with Stata 15.1.*

- Feronika, B., Rumate, V. A., & Walewangko, E. N. 2019. "Pengaruh pendapatan asli daerah dan alokasi umum terhadap belanja langsung dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung". *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5).
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Imani, Cori Nadhifa. 2022. *Tinjauan Dampak Pandemi Covid-19 atas Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Tahun Anggaran 2020*. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Indraningrum, T. 2011. *Pengaruh pendapatan asli daerah (pad) dan dana alokasi umum (dau) terhadap belanja langsung (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah)*.
- Juniawan M.A., dan Suryantini N. P., 2018. *Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali*. *E jurnal Manajemen UDAYANA*.
- Kementerian Keuangan. *Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>
- Kirana, T. A., 2016. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus 38 Kota/Kabupaten Se-Jawa Timur Tahun 2009-2013)*.
- Khaerunisa, K. 2021. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal di Provinsi Banten*.

- Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode riset untuk bisnis dan ekonomi bagaimana meneliti dan menulis tesis?. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Kustinah, E. 2018. Analisa Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo.
- Larasati, Endang. 2015. Keuangan Publik In : Paradigma Baru Keuangan Negara dan Ruang Lingkupnya. Universitas Terbuka.
- Nakita, S. Y. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Sumatera Barat.
- Nani, Richard Doh., and Awunyo-Vitor, Dadson. 2012. The Causal Link between Government Expenditure and Government Revenue in Ghana. *Asian Economic and Financial Review*, 2(2), pp: 382-388.
- Napitupulu, J. H., Ellyawati, N., & Astuti, R. F. 2021. Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Kota Samarinda. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 9(3), 138-144
- Noviarti, H., dan Rahayu, S. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Indonesia (studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2020).
- Resti, Rahayu. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2017.
- Runjung, R.M.R.P.K., Primastuti, A., dan Rismawati. 2022. Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*. Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sari, Permatamaya. 2017. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dan Dana



Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan

- Septi Monika, T. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2008- 2019.
- Sugiyono. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Suprianto, D. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya.
- Suryana, F. dan Pariani, E. 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. PEKA, 6(1), 11-22.
- Sumarsono, Silo. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
- Venkataraman, S., & Urmi, A. (2017). Development Expenditure, Fiscal Consolidation And Public Revenue In India.
- Widiagma, Aditya Putra. (2015). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Purwantoro, dan Lilis Setyowati. 2019. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi.
- Winarno, Wing Wahyu. 2017. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews, Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis (pp. 693-701).



## LAMPIRAN

### *Lampiran I*

#### Data PAD, DAU, Belanja Modal Sumbar 2013-2021 (miliar rupiah)

Tahun	PAD	DAU	BM
2013	1366,18	1039,92	691,49
2014	1729,22	1129,89	785,89
2015	1876,73	1221,13	788,15
2016	1964,15	1261,91	989,93
2017	2134,01	2014,65	832,18
2018	2275,09	2014,65	1099,7
2019	2328,43	2076,4	1062,23
2020	2255,07	1891,32	736,89
2021	2551,9	1887,03	666,35
2022	2853,34	1887,03	988,53

Sumber Data : Badan Pusat Statistik dan DJPK Kementerian Keuangan

### *Lampiran II*

#### Data PAD, DAU, Belanja Modal Kab/kota Sumbar 2013-2021 (miliar rupiah)

KAB/KOTA	TAHUN	PAD	DAU	BM
Kab. Agam	2013	49,95	676,52	162,5
Kab. Agam	2014	79,45	739,36	153,14
Kab. Agam	2015	90,2	767,75	161,07
Kab. Agam	2016	102,6	767,75	192,85
Kab. Agam	2017	161,54	813,47	270,02
Kab. Agam	2018	99,68	813,47	212,32
Kab. Agam	2019	123,66	844,92	280,83
Kab. Agam	2020	107,16	756,38	135,09
Kab. Agam	2021	129,15	745,5	142,41
Kab. Agam	2022	159,21	745,5	164,66
Kab. Dharmasraya	2013	32,9	400,37	157,12
Kab. Dharmasraya	2014	52,81	445,13	183,62
Kab. Dharmasraya	2015	90,2	767,75	161,07
Kab. Dharmasraya	2016	56,45	767,75	265,43
Kab. Dharmasraya	2017	98,94	501,68	270,15
Kab. Dharmasraya	2018	110,21	502,3	216,74
Kab. Dharmasraya	2019	78,88	524,89	226,6

Kab. Dharmasraya	2020	82,88	478,36	194,53
Kab. Dharmasraya	2021	82,83	472,42	166,25
Kab. Dharmasraya	2022	87,04	472,61	109,12
Kab. Kepulauan Mentawai	2013	31,3	465,54	245,57
Kab. Kepulauan Mentawai	2014	36,44	531,39	197,54
Kab. Kepulauan Mentawai	2015	42,78	546,8	251,48
Kab. Kepulauan Mentawai	2016	41,95	546,8	277,85
Kab. Kepulauan Mentawai	2017	67,86	591,34	313,68
Kab. Kepulauan Mentawai	2018	45,36	610,94	222,21
Kab. Kepulauan Mentawai	2019	40,2	626,67	297,67
Kab. Kepulauan Mentawai	2020	34,91	556,46	142
Kab. Kepulauan Mentawai	2021	31,64	556,46	164,64
Kab. Kepulauan Mentawai	2022	38,09	549,79	104,8
Kab. Lima Puluh Kota	2013	33,1	632,93	163,99
Kab. Lima Puluh Kota	2014	52,83	700,18	191,36
Kab. Lima Puluh Kota	2015	62,93	725,62	174,18
Kab. Lima Puluh Kota	2016	68,06	725,62	252,97
Kab. Lima Puluh Kota	2017	119,77	747,07	233,12
Kab. Lima Puluh Kota	2018	73,44	747,07	232,64
Kab. Lima Puluh Kota	2019	85,17	769,11	252,91
Kab. Lima Puluh Kota	2020	77,43	696,87	152,71
Kab. Lima Puluh Kota	2021	78,85	686,67	147,62
Kab. Lima Puluh Kota	2022	82,92	686,67	140,33
Kab. Padang Pariaman	2013	42,62	633,45	153,47
Kab. Padang Pariaman	2014	72,88	542,07	157,97
Kab. Padang Pariaman	2015	73	724,23	210,06
Kab. Padang Pariaman	2016	72,86	724,23	306,5
Kab. Padang Pariaman	2017	141,31	769,83	367,12
Kab. Padang Pariaman	2018	84,5	769,83	86,09
Kab. Padang Pariaman	2019	101,61	792,62	263,55
Kab. Padang Pariaman	2020	105,89	716,08	182,34
Kab. Padang Pariaman	2021	116,9	706,49	137,16
Kab. Padang Pariaman	2022	126,25	706,49	129,04
Kab. Pasaman	2013	46,02	481,18	148,87
Kab. Pasaman	2014	72,88	542,07	157,97
Kab. Pasaman	2015	79,68	562,78	175,59
Kab. Pasaman	2016	88,86	562,78	234,02
Kab. Pasaman	2017	142,75	596,08	184,94
Kab. Pasaman	2018	100,07	596,08	140,81
Kab. Pasaman	2019	98,6	619,59	125,91
Kab. Pasaman	2020	92,58	557,42	125,38

Kab. Pasaman	2021	89,39	551,66	106,88
Kab. Pasaman	2022	88,84	551,73	150,68
Kab. Pasaman Barat	2013	37,83	523,53	153,64
Kab. Pasaman Barat	2014	69,93	580,41	193,09
Kab. Pasaman Barat	2015	69,13	611,16	193,33
Kab. Pasaman Barat	2016	91,17	611,16	267,7
Kab. Pasaman Barat	2017	158,92	644,33	263,07
Kab. Pasaman Barat	2018	158,87	644,33	327,27
Kab. Pasaman Barat	2019	104,07	661,89	261,17
Kab. Pasaman Barat	2020	108,86	598,77	182,36
Kab. Pasaman Barat	2021	136,99	596,43	146,09
Kab. Pasaman Barat	2022	92,81	597,35	86,28
Kab. Pesisir Selatan	2013	47,7	689,38	167,9
Kab. Pesisir Selatan	2014	86,7	753,98	213,29
Kab. Pesisir Selatan	2015	107,99	784,83	277,12
Kab. Pesisir Selatan	2016	108,92	784,83	284
Kab. Pesisir Selatan	2017	176,9	838,1	256,91
Kab. Pesisir Selatan	2018	123,91	838,1	257,29
Kab. Pesisir Selatan	2019	134,8	862,61	324,88
Kab. Pesisir Selatan	2020	132,75	784,05	261,93
Kab. Pesisir Selatan	2021	145,03	777,27	218,72
Kab. Pesisir Selatan	2022	136,03	777,57	250,75
Kab. Sijunjung	2013	38,1	448,68	159,05
Kab. Sijunjung	2014	54,26	498,59	144,58
Kab. Sijunjung	2015	65,01	516,69	167,5
Kab. Sijunjung	2016	76,83	516,69	243,96
Kab. Sijunjung	2017	107,92	548,57	189,76
Kab. Sijunjung	2018	79,06	548,57	205,82
Kab. Sijunjung	2019	83,91	562,19	204,21
Kab. Sijunjung	2020	92,47	509,07	143,52
Kab. Sijunjung	2021	91,77	502,2	132,65
Kab. Sijunjung	2022	81,78	502,2	156,7
Kab. Solok	2013	31,49	588,04	144,29
Kab. Solok	2014	51,5	651,73	175,93
Kab. Solok	2015	55,61	676,07	179,31
Kab. Solok	2016	58,8	676,07	205,32
Kab. Solok	2017	113,27	710,96	204,62
Kab. Solok	2018	68,3	710,96	167,16
Kab. Solok	2019	74,6	731,03	194,82
Kab. Solok	2020	70,57	661,47	110,71
Kab. Solok	2021	75,86	645,5	135,59

Kab. Solok	2022	67,75	645,5	187,2
Kab. Solok Selatan	2013	22,23	351,51	165,59
Kab. Solok Selatan	2014	32,34	406,54	183,84
Kab. Solok Selatan	2015	41,21	433,59	251,46
Kab. Solok Selatan	2016	51,14	433,59	234,22
Kab. Solok Selatan	2017	75,51	480,41	223,54
Kab. Solok Selatan	2018	60,55	480,41	196,41
Kab. Solok Selatan	2019	67,84	494,41	210,38
Kab. Solok Selatan	2020	76,86	441,99	124,58
Kab. Solok Selatan	2021	80,46	431,17	127,05
Kab. Solok Selatan	2022	92,29	437,44	202,06
Kab. Tanah Datar	2013	63,84	587,1	128,06
Kab. Tanah Datar	2014	99,69	650,56	123,05
Kab. Tanah Datar	2015	112,07	667,14	137,03
Kab. Tanah Datar	2016	118,97	667,14	187,78
Kab. Tanah Datar	2017	172,81	695,56	197,92
Kab. Tanah Datar	2018	115,91	695,56	165,13
Kab. Tanah Datar	2019	129,79	720,17	202,89
Kab. Tanah Datar	2020	122,25	646,91	107,79
Kab. Tanah Datar	2021	121,38	637,17	142,52
Kab. Tanah Datar	2022	144,52	637,17	112,27
Kota Bukittinggi	2013	55,2	368,31	76,29
Kota Bukittinggi	2014	61,61	404,29	76,55
Kota Bukittinggi	2015	66,03	408,64	69,17
Kota Bukittinggi	2016	71,3	408,64	80,93
Kota Bukittinggi	2017	102,38	450,91	115,74
Kota Bukittinggi	2018	101,94	450,91	178,01
Kota Bukittinggi	2019	111,9	465,05	187,99
Kota Bukittinggi	2020	84,09	429,03	249,32
Kota Bukittinggi	2021	91,79	421,33	93,04
Kota Bukittinggi	2022	130,8	421,33	124,01
Kota Padang	2013	238,87	1003,12	289,61
Kota Padang	2014	315,68	1060,92	272,95
Kota Padang	2015	370,41	1.072,43	287,58
Kota Padang	2016	391,93	1.072,43	408,31
Kota Padang	2017	548,65	1100,37	397,84
Kota Padang	2018	487,94	1100,37	419,84
Kota Padang	2019	546,11	1176,32	491,01
Kota Padang	2020	499,9	1061,39	304,79
Kota Padang	2021	538,93	1044,87	297,91
Kota Padang	2022	555,74	1044,87	316,93

Kota Padang Panjang	2013	41,51	302,85	68,22
Kota Padang Panjang	2014	51,6	341,74	64,71
Kota Padang Panjang	2015	67,04	343,01	111,19
Kota Padang Panjang	2016	70,36	343,01	146,9
Kota Padang Panjang	2017	88,84	375,44	211,51
Kota Padang Panjang	2018	79,75	375,44	125,03
Kota Padang Panjang	2019	77,32	390,32	98,19
Kota Padang Panjang	2020	79,43	352,75	54,6
Kota Padang Panjang	2021	93,08	346,45	58,12
Kota Padang Panjang	2022	88	346,45	44,13
Kota Pariaman	2013	20,64	343,06	131,62
Kota Pariaman	2014	26,68	386,26	127,56
Kota Pariaman	2015	29,9	389,75	170,19
Kota Pariaman	2016	29,68	389,75	178,37
Kota Pariaman	2017	30,88	415,24	153,29
Kota Pariaman	2018	32,21	415,24	132,43
Kota Pariaman	2019	36,67	428,12	156,39
Kota Pariaman	2020	32,96	389,25	94,47
Kota Pariaman	2021	38,03	382,77	69,7
Kota Pariaman	2022	36,04	382,77	61,32
Kota Payakumbuh	2013	54,18	369,12	77,99
Kota Payakumbuh	2014	65,9	412,93	105,24
Kota Payakumbuh	2015	100,65	425,11	164,67
Kota Payakumbuh	2016	87,45	425,11	161,52
Kota Payakumbuh	2017	116,6	437,7	176,63
Kota Payakumbuh	2018	94,29	437,7	149,45
Kota Payakumbuh	2019	104,07	468,55	182,22
Kota Payakumbuh	2020	116	421,05	119,99
Kota Payakumbuh	2021	90,29	413,83	110,13
Kota Payakumbuh	2022	126,96	413,83	118,84
Kota Sawahlunto	2013	37,1	396,4	68,69
Kota Sawahlunto	2014	48,58	332,78	88,08
Kota Sawahlunto	2015	52,27	344,94	135,44
Kota Sawahlunto	2016	53,39	344,94	132,83
Kota Sawahlunto	2017	62,46	375,13	123,74
Kota Sawahlunto	2018	47,23	375,13	77,53
Kota Sawahlunto	2019	57,17	390,09	94,38
Kota Sawahlunto	2020	59,54	347,5	63,7
Kota Sawahlunto	2021	51,48	341,39	85,61
Kota Sawahlunto	2022	65,36	341,39	116,47
Kota Solok	2013	24,14	318,61	88,84

Kota Solok	2014	29,52	354,37	83,82
Kota Solok	2015	36,63	360,72	96,29
Kota Solok	2016	42,12	360,72	136,03
Kota Solok	2017	41,85	398,11	140,48
Kota Solok	2018	40,74	398,11	159,59
Kota Solok	2019	41,65	413,24	115,01
Kota Solok	2020	40,55	376,13	32,74
Kota Solok	2021	42,41	369,34	99,27
Kota Solok	2022	42,11	369,34	99,27

Sumber Data : Badan Pusat Statistik dan DJPK Kementerian Keuangan

Lampiran III

**Model Estimasi**

**CEM**

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.18269	13.82078	1.749735	0.0818
PAD	0.148613	0.059335	2.504629	0.0131
DAU	0.238469	0.029349	8.125307	0.0000
Root MSE	52.04760	R-squared		0.531768
Mean dependent var	175.7497	Adjusted R-squared		0.526760
S.D. dependent var	76.26340	S.E. of regression		52.46344
Akaike info criterion	10.77377	Sum squared resid		514701.1
Schwarz criterion	10.82504	Log likelihood		-1020.508
Hannan-Quinn criter.	10.79454	F-statistic		106.1874
Durbin-Watson stat	1.018604	Prob(F-statistic)		0.000000

**FEM**

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.68645	42.12844	-1.749090	0.0821
PAD	0.240618	0.109216	2.203144	0.0289
DAU	0.393127	0.078272	5.022589	0.0000



Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	43.23962	R-squared	0.676836	
Mean dependent var	175.7497	Adjusted R-squared	0.638592	
S.D. dependent var	76.26340	S.E. of regression	45.84746	
Akaike info criterion	10.59244	Sum squared resid	355236.2	
Schwarz criterion	10.95133	Log likelihood	-985.2822	
Hannan-Quinn criter.	10.73782	F-statistic	17.69771	
Durbin-Watson stat	1.465344	Prob(F-statistic)	0.000000	
<b>REM</b>				
Sample: 2013 2022				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 19				
Total panel (balanced) observations: 190				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.777199	21.99197	0.444581	0.6571
PAD	0.175927	0.081120	2.168720	0.0314
DAU	0.258884	0.043620	5.934924	0.0000
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		26.24667	0.2468	
Idiosyncratic random		45.84746	0.7532	
Weighted Statistics				
Root MSE	45.98651	R-squared	0.333017	
Mean dependent var	84.97851	Adjusted R-squared	0.325883	
S.D. dependent var	56.45715	S.E. of regression	46.35392	
Sum squared resid	401804.2	F-statistic	46.68348	
Durbin-Watson stat	1.297210	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.525711	Mean dependent var	175.7497	
Sum squared resid	521358.8	Durbin-Watson stat	0.999742	



### Uji Pemilihan Model

#### Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.214653	(18,169)	0.0000
Cross-section Chi-square	70.452619	18	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Date: 06/20/23 Time: 11:29

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.18269	13.82078	1.749735	0.0818
PAD	0.148613	0.059335	2.504629	0.0131
DAU	0.238469	0.029349	8.125307	0.0000

Root MSE	52.04760	R-squared	0.531768
Mean dependent var	175.7497	Adjusted R-squared	0.526760
S.D. dependent var	76.26340	S.E. of regression	52.46344
Akaike info criterion	10.77377	Sum squared resid	514701.1
Schwarz criterion	10.82504	Log likelihood	-1020.508
Hannan-Quinn criter.	10.79454	F-statistic	106.1874
Durbin-Watson stat	1.018604	Prob(F-statistic)	0.000000

#### Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.154231	2	0.0461

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	0.240618	0.175927	0.005348	0.3764
DAU	0.393127	0.258884	0.004224	0.0389

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BM

Method: Panel Least Squares

Sample: 2013 2022

Periods included: 10

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-73.68645	42.12844	-1.749090	0.0821
PAD	0.240618	0.109216	2.203144	0.0289
DAU	0.393127	0.078272	5.022589	0.0000

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	43.23962	R-squared	0.676836
Mean dependent var	175.7497	Adjusted R-squared	0.638592
S.D. dependent var	76.26340	S.E. of regression	45.84746
Akaike info criterion	10.59244	Sum squared resid	355236.2
Schwarz criterion	10.95133	Log likelihood	-985.2822
Hannan-Quinn criter.	10.73782	F-statistic	17.69771
Durbin-Watson stat	1.465344	Prob(F-statistic)	0.000000

#### Uji Lagrange

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	34.75537 (0.0000)	110.9685 (0.0000)	145.7238 (0.0000)

Honda	5.895368 (0.0000)	10.53416 (0.0000)	11.61743 (0.0000)
King-Wu	5.895368 (0.0000)	10.53416 (0.0000)	12.00480 (0.0000)
Standardized Honda	6.752801 (0.0000)	11.32099 (0.0000)	8.926122 (0.0000)
Standardized King-Wu	6.752801 (0.0000)	11.32099 (0.0000)	9.459433 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	145.7238 (0.0000)

